

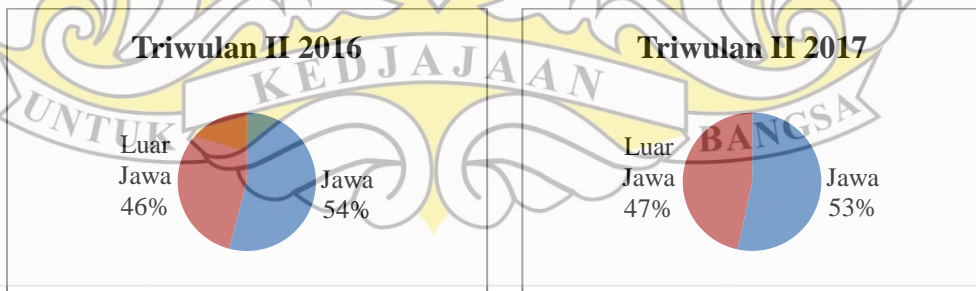
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal ke dalam negeri pada umumnya merupakan salah satu masalah dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan investasi dan pendukungnya, yang mengarah pada peningkatan pembangunan daerah untuk memicu masuknya investasi. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh dengan pesat, sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Grafik 1.1 Perbandingan Realisasi Penanaman Modal Triwulan II 2017 dan Triwulan II 2016: Jawa dan Luar Jawa



| Pulau | Triwulan II 2017 | Triwulan II 2016 |
|------------------|------------------|------------------|
| Jawa | 91.2 T | 82 T |
| Luar Jawa | 79.7 T | 69.6 T |
| Total | 170.9 T | 151.6 T |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017 (data diolah)

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Triwulan II 2017 tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi terbesar didominasi oleh pulau Jawa dibandingkan dengan agregat investasi pada luar pulau Jawa. Hal tersebut menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan investasi di berbagai sektor pada daerah di Indonesia.

Dalam era desentralisasi fiskal, penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, salah satunya yakni melalui anggaran belanja modal. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan.

Sebagaimana diketahui peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang tidak sedikit untuk dapat merealisasikannya. Salah satunya adalah dengan melibatkan alokasi belanja modal daerah, sedangkan besarnya alokasi belanja modal daerah ini juga dapat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan daerah yang diantaranya adalah besarnya alokasi dana perimbangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Peningkatan belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting karena faktor kesiapan infrastruktur daerah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sebagaimana dalam Survei Tahun 2010 (OECD, 2010), prioritas kedua adalah penyediaan infrastruktur bermutu tinggi melalui investasi yang lebih besar, dan pemeliharaan yang lebih baik, khususnya terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang menyulitkan dan menurunkannya belanja infrastruktur setelah terjadinya Krisis Asia. Infrastruktur meningkatkan produktivitas dan menggalakan dunia usaha dengan cara menurunkan biaya transportasi dan produksi serta mempermudah akses terhadap pasar. Infrastruktur tidak hanya memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dalam rantai nilai global, tetapi juga mendorong mobilitas orang di seluruh kawasan nusantara sehingga pertumbuhan dapat menjadi lebih inklusif. Bank Dunia (2012) menyebutkan dalam periode tiga tahun tepat sebelum terjadinya Krisis Asia, belanja infrastruktur secara rata-rata mencapai sekitar 9% dari PDB, namun sejak tahun 1999, angka rata-rata

tersebut hanya mencapai sekitar 4% (Dalam Ikhtisar: Survei Ekonomi OECD Indonesia, 2015).

Peningkatan sarana dan prasarana menciptakan *multiplier effects* yang mendukung produktivitas dan keberhasilan tidak hanya bagi masyarakat, investor bahkan bagi peningkatan prestasi suatu daerah pada umumnya. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Abimanyu, 2005).

Jika dibandingkan dengan target investasi di luar Jawa pada periode yang lain, menurut Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2015 dijelaskan bahwa capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di luar Jawa mencapai 104,9% dari target Rp236,9 triliun yaitu Rp248,7 triliun. Hal ini cukup menggembirakan karena memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di luar Jawa menunjukkan hasil yang positif. Hal positif ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah faktor keberhasilan tersebut diantaranya dipacu oleh besar atau kecilnya belanja modal yang telah dikeluarkan pemerintah yang sebagian besar bergantung dari dana perimbangan yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Apakah hal ini sejalan dengan fluktuasi pengeluaran belanja modal

yang setiap tahun dikeluarkan pemerintah dengan peningkatan investasi dalam negeri ke suatu daerah. Apakah asumsi adanya korelasi positif ini hanya bersifat sementara tanpa memperhatikan *time series* dalam jangka panjang dan lokasi daerah serta ataukah hanya mempertimbangkan nilai secara agregat yang sebenarnya dapat dimungkinkan hanya ditunjang oleh daerah tertentu yang memiliki nilai tertinggi dalam hal realisasi investasi dalam negeri (*domestic investment*).

Selanjutnya, beberapa penelitian telah dilakukan terhadap variabel belanja modal ini dengan memperhatikan variabel lain yang mempengaruhinya. Terdapat hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah (Sularso, 2011).

Hasil penelitian lainnya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (Farah, 2011). Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan bukti empiris pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2008 – 2010 dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian lain melalui *International Journal of Database Theory and Application* yang dilakukan oleh Yuan Wang, Yihua Zhang dan Qiuting Liu dengan judul *The Research on the Relationship of Domestic Investment, Government Consumption, Household Consumption and Economic Growth- an Empirical Study of Fujian Province*. Penelitian tersebut dilakukan pada Provinsi Fujian sebagai obyek studi dengan data panel 1981-2012 untuk menganalisis kuantitatif mengenai korelasi antara investasi dalam negeri, konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Fujian. Hasil penelitian mengungkapkan keseimbangan stabil jangka panjang antara investasi, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga di Provinsi Fujian serta hubungan kausal dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Untuk jangka pendek, konsumsi rumah tangga memiliki dampak positif yang relatif kuat terhadap keuntungan ekonomi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam negeri merupakan faktor yang relatif jelas terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan berdampak negatif tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, investasi pemerintah relatif kecil berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lebih lama.

Tentunya hasil penelitian ini dapat dimungkinkan berbeda apabila obyek studi dilakukan pada daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari aspek *time frame* jelas berbeda dengan beberapa tahun terakhir dimana kegiatan perekonomian lebih kompleks dan berkembang

cukup melesat serta faktor-faktor lain yang berkembang pada daerah di suatu negara, termasuk kebijakan yang berbeda pula. Selain itu, satu variabel yang sama yakni variabel *domestic investment* pada suatu penelitian dapat menghasilkan hasil pengaruh yang berbeda pula terhadap variabel yang lain, dimana peneliti pada kesempatan ini lebih ingin mengetahui pengaruh belanja modal terhadap variabel *domestic investment* tersebut dengan variabel lain yang mengintervensinya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, peneliti mempertimbangkan perlu diketahui mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan penanaman modal dalam negeri (*domestic investment*) suatu daerah secara lebih spesifik dimana alokasi anggaran belanja modal tentunya dipengaruhi oleh penerimaan daerah yang dapat berupa dana perimbangan daerah, di samping pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana diketahui dari hasil penelitian sebelumnya. Apakah pengaruhnya secara umum terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya sejalan positif dengan pertumbuhan arus kas masuk investasi dalam negeri pada seluruh provinsi di Indonesia jika terdapat kenaikan atau penurunan dana perimbangan sebagai variabel yang akan mempengaruhinya. Penelitian ini dapat juga membuktikan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya terhadap pengaruh langsung suatu variabel (belanja modal) dengan variabel lainnya, bahkan dimungkinkan dapat membantah hasil penelitian tersebut, disamping untuk mengetahui pengaruhnya secara tidak langsung antara variabel yang diteliti terhadap variabel lain berupa variabel *domestic investment* tersebut.

Hal ini menarik untuk dibuktikan apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap peningkatan *domestic investment* atau penanaman modal dalam negeri yang masuk ke daerah dengan mempertimbangkan adanya intervensi besar kecilnya alokasi dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini terutama akan dilakukan dalam lingkup pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, penelitian ini berjudul **“PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP *DOMESTIC INVESTMENT* DENGAN DANA PERIMBANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2011-2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Dana Alokasi Umum?
- b. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Dana Alokasi Khusus?
- c. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap *Domestic Investment*?
- d. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap *Domestic Investment*?

- e. Apakah Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap *Domestic Investment*?
- f. Apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap *Domestic Investment*?
- g. Apakah Belanja Modal berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap *Domestic Investment* melalui Dana Alokasi Umum sebagai variabel intervening?
- h. Apakah Belanja Modal berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap *Domestic Investment* melalui Dana Alokasi Khusus sebagai variabel intervening?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Belanja Modal terhadap *Domestic Investment* Daerah dengan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai variabel yang mengintervensinya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada publik dan manajemen pemerintah mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap *Domestic Investment* melalui adanya intervensi alokasi DAU dan DAK. Selanjutnya, dalam hal penganggaran, pemerintah dapat menentukan dan

mempertimbangkan besar kecilnya alokasi belanja modal untuk menunjang peningkatan investasi ke daerah yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerahnya.

- b. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan (referensi) bagi para peneliti dalam bidang terkait diantaranya mengenai penganggaran daerah dan manajemen keuangan pemerintah.
- c. Menambah kajian empirik ilmu pemerintahan khususnya di bidang manajemen sektor publik bagi para akademisi.

